

KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SDGs
MEMIKIRKAN MEKANISME PENDANAAN

Yanuar Nugroho

Deputi II Kepala Staf Keperesidenan
Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis
yanuar.nugroho@ksp.go.id; @yanuarnugroho

Jakarta, 14 November 2017

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN – *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*



MDGs:
8 goals dan 50 target



SDGs jauh lebih kompleks:
17 *goals* dan 169 target



SDGs **mendorong** pelaksanaan Nawa Cita

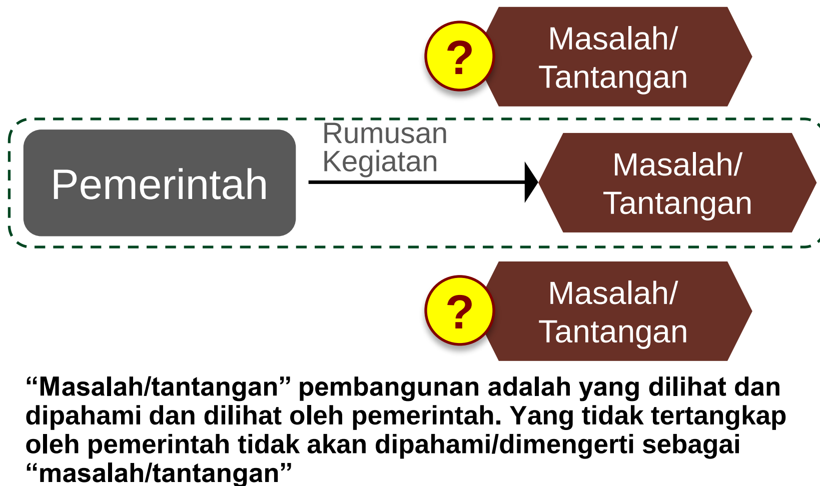
NAWA CITA
9 AGENDA PRIORITAS

Yang membedakan SDGs dengan komitmen sebelumnya ?

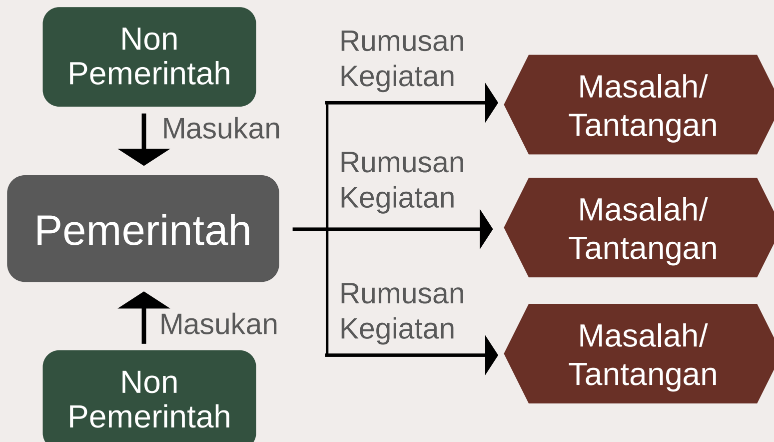
- ❑ **Partisipasi kelompok masyarakat (Kemitraan)**
- ❑ **Menyeluruh**
- ❑ **transparansi**

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INDONESIA DALAM MENYUSUN TATA KELOLA *SDGs*

KENDALA PRINSIPIL:

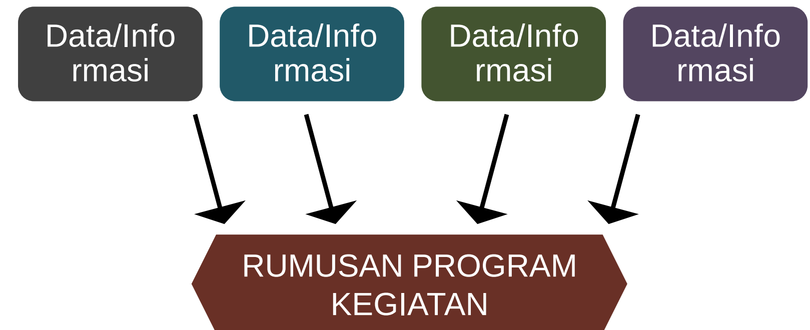


“Masalah/tantangan” pembangunan adalah yang dilihat dan dipahami dan dilihat oleh pemerintah. Yang tidak tertangkap oleh pemerintah tidak akan dipahami/dimengerti sebagai “masalah/tantangan”

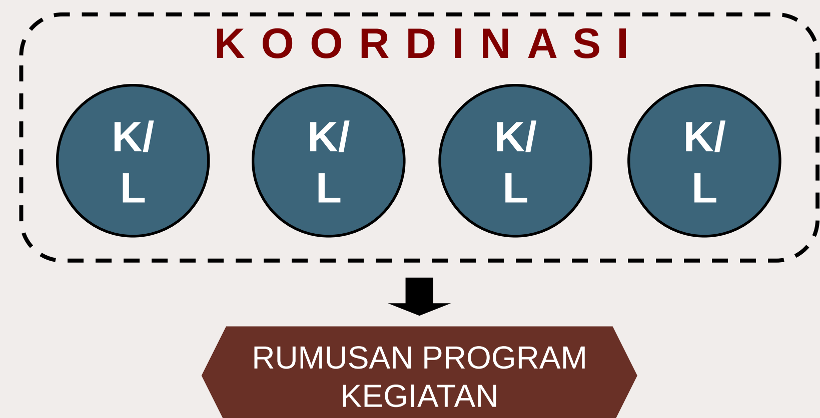


Menerima masukan dan merumuskan masukan dari aktor non pemerintah dalam menyusun penyesuaian kegiatan/program pemerintah.

KENDALA TEKNIS:



Dimensi informasi sangat menentukan bagaimana proses pengambilan keputusan. Namun, saat ini belum ada penggunaan data/informasi yang sama dalam sebuah program/kegiatan.



Membentuk koordinasi di tingkat kementerian agar prosesnya saling melengkapi dimensi permasalahan. Hal ini dikarenakan K/L cenderung melihat dari perspektif tugas fungsi, bukan program.



IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG INKLUSIF DAN PARTISIPATIF

VISI & MISI	**IMPLEMENTASI TPB YANG INKLUSIF DAN PARTISIPATIF**		
OUTCOME	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL (17 SASARAN, 169 TARGET GLOBAL, 96 TARGET NASIONAL)		
KERANGKA	**Kerangka Regulasi dan Kebijakan**	**Kerangka Institusi**	**Kerangka Akuntabilitas**
PEMBIAYAAN	**MEKANISME PENDANAAN**		
SUMBER	**KONVENSIONAL** ○ APBN ○ *Public-private partnership* (PPP)	**NON-KONVENSIONAL** ○ Sektor pendanaan korporasi (CSR, termasuk BUMN) ○ ***Responsible investment* (swasta-swasta)**	

STRATEGI IMPLEMENTASI: TATA KELOLA



Data yang :
1. Terbuka dan dapat digunakan bersama (*interoperable*)
2. Penggunaan variabel alternatif dalam menghasilkan data yang akuntabel



Prioritisasi Tujuan dan Sasaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan nasional





Indikator yang kaya dan berkualitas: penentuan bersama



Menentukan titik awal dan titik capaian:
1. Dari apa yang ada dan merekonsiliasinya
2. Bertolak dari sumber daya dan kemampuan

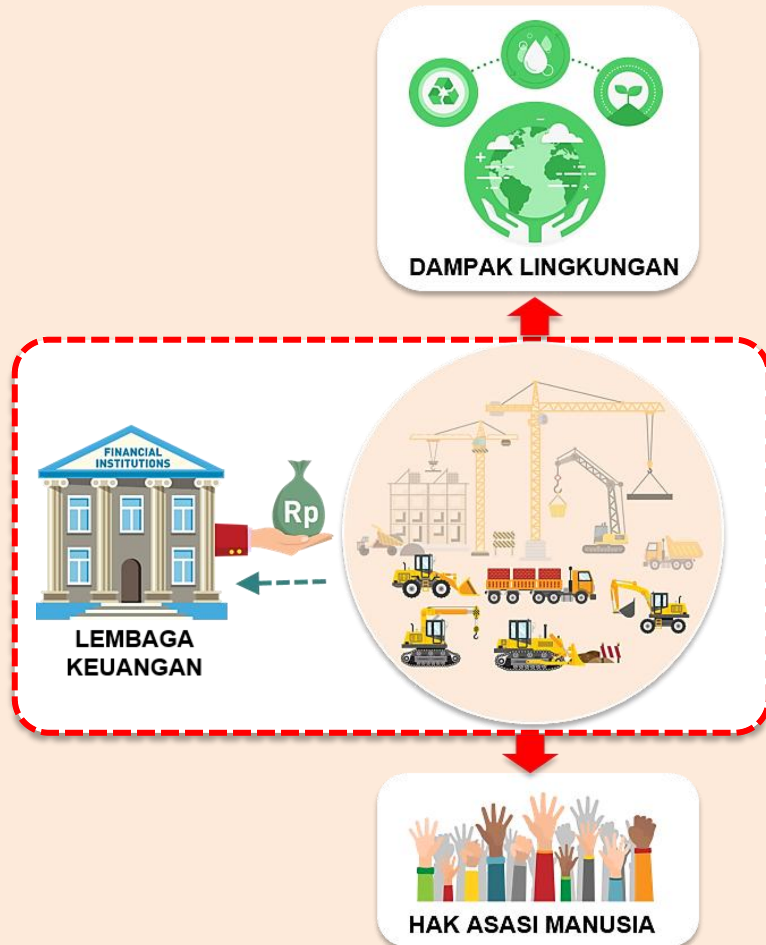


Pendanaan dan sumber daya: kolektif

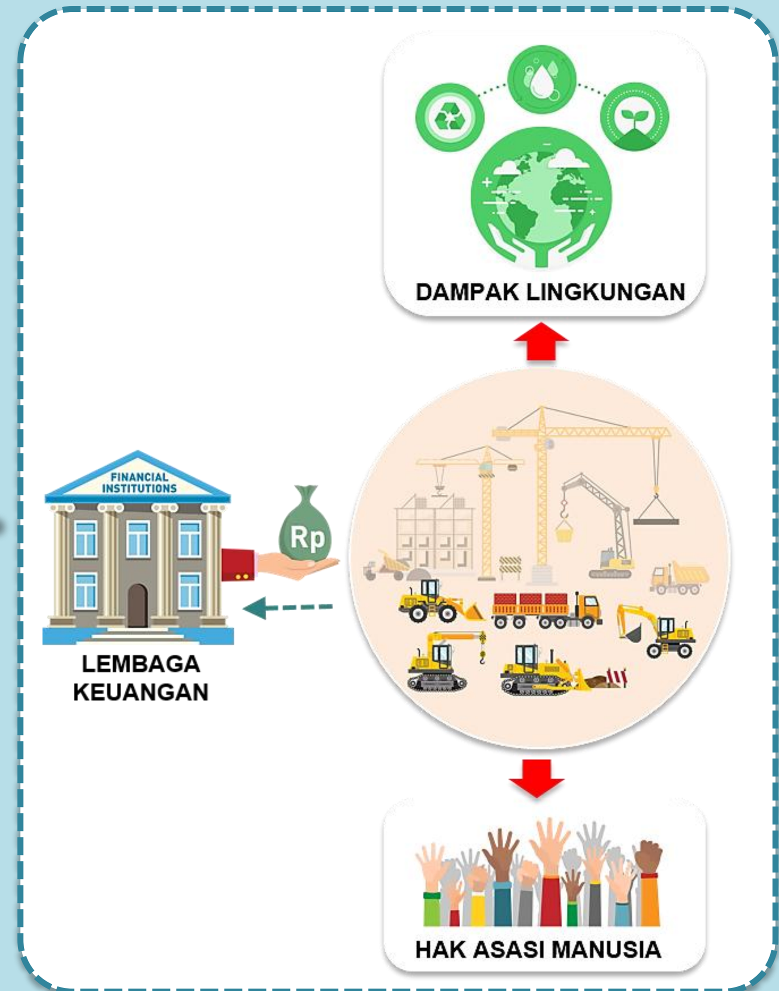


ON SUSTAINABLE FINANCING

KONDISI SAAT INI



USULAN





PENDANAAN BERKELANJUTAN

UPAYA TERKINI

1. Badan PBB melalui UNPRI sudah mulai mengarahkan investor agar melakukan investasi yang bersifat *responsible*, dan lembaga perbankan dalam negeri juga sudah mulai meningkatkan kewaspadaannya.
2. OJK sudah mulai meningkatkan *awareness* organisasinya, namun semua aktor (pemerintah, perusahaan, pengawasan masyarakat, teknologi, lembaga regulasi perbankan) harus maju bertahap dan bersamaan.
3. Mendorong penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas proses kerja

HASIL

1. Peremajaan karet di Bukit 30, dengan melibatkan peran CSOs dalam melakukan pengawasan dan terdefinisi dengan jelas.
2. Nelayan, atau petani selama ini tidak bisa mendapatkan akses ke modal, dan untuk memulai dari riwayat yang masih nol, akan sulit mendapatkan manfaat.
3. *GeoTraceability* sudah mulai digunakan di beberapa perusahaan perkebunan dalam negeri. Teknologi ini memberikan informasi kesejahteraan petani ke perusahaan di dalam sebuah *platform*, selain informasi pengelolaan kebun dan hasil kebun.



TERIMA KASIH

KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Bina Graha
Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia